



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN JADWAL ACARA
RAPAT – RAPAT PEMBAHASAN RUU TENTANG CIPTA KERJA**

TANGGAL 7 APRIL 2020

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 4 (empat)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 7 April 2020.
P u k u l	: 14.15 WIB s/d 15.30 WIB.
T e m p a t	: Rapat Virtual di R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.(hadir langsung di ruang rapat Baleg)
A c a r a	: Pembahasan Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019 – 2020
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 46 orang hadir (9 orang secara fisik dan 35 orang secara Virtual) dari 80 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat pembahasan RUU tentang Cipta Kerja pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019 – 2020 dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat terkait rancangan jadwal Rapat-Rapat pembahasan RUU tentang Cipta Kerja pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan dalam rangka pembahasan RUU tentang Cipta Kerja yang diusulkan Pemerintah untuk dibahas Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020, sebagai berikut :
1. Bahwa sesuai dengan keputusan Rapat Bamus yang disampaikan oleh Pimpinan DPR melalui surat No : PW/04777/DPR RI/IV/2020/ tanggal 3 April 2020, Badan Legislasi ditugaskan untuk membahas RUU tentang Cipta Kerja bersama dengan Pemerintah.
 2. Sebelum Rapat Kerja dengan Pemerintah dilaksanakan, kiranya diperlukan adanya kesepahaman antara Anggota Badan Legislasi terkait dengan jadwal acara rapat pembahasan RUU tentang Cipta Kerja tersebut.
 3. Pimpinan Badan Legislasi dan Kaposi fraksi-fraksi sebelumnya telah melakukan rapat terkait dengan penyusunan jadwal acara pembahasan RUU tentang Cipta Kerja tersebut, adapun beberapa point yang disepakati adalah :
 - Jadwal acara pembahasan RUU tentang Cipta Kerja pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 disepakati dengan catatan bahwa jadwal bersifat tentatif sesuai dengan kebutuhan.
 - Rapat Kerja dengan Pemerintah akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
 - Pembentukan Panja pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dilakukan setelah Rapat Kerja dengan Pemerintah dilaksanakan.
 - Untuk Fraksi yang sudah menyelesaikan DIM atas RUU tentang Cipta Kerja dapat diserahkan pada saat Rapat Kerja dengan Pemerintah melalui Sekretariat Badan Legislasi, namun bagi fraksi yang belum menyelesaikan DIM RUU dapat menyerahkannya setelah Rapat Kerja.
 - DIM yang telah selesai akan dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (*cluster*) yang telah disusun oleh Tim Ahli, yaitu terdapat 11 kelompok materi.
 - Menugaskan Tim Ahli dan BKD untuk membuat DIM sandingan sebagai bahan persandingan fraksi.
 4. Jadwal acara pembahasan RUU tentang Cipta Kerja secara lengkap sebagaimana yang disampaikan kepada Anggota Badan Legislasi dan jadwal tersebut bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.
- B. Tanggapan Anggota terhadap rancangan jadwal acara rapat-rapat pembahasan RUU tentang Cipta Kerja pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020, sebagai berikut :
1. Seluruh Fraksi-Fraksi menyetujui Jadwal Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja dengan catatan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.
 2. Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja diharapkan dapat dilakukan secara cermat dan tidak ditargetkan dalam waktu tertentu, mengingat

RUU ini merupakan RUU yang sifatnya baru dan banyak hal yang memerlukan masukan/pandangan dari masyarakat.

3. Penyerahan DIM Fraksi atas RUU tentang Cipta Kerja kiranya dapat dilakukan setelah dilaksanakannya jaring aspirasi/RDPU.
4. Rapat Kerja yang akan dilaksanakan kiranya untuk mengetahui kesiapan Pemerintah dalam melakukan pembahasan RUU ini mengingat suasana negara yang saat ini dilanda wabah covid-19
5. Terkait dengan draft RUU tentang Cipta Kerja, kiranya perlu konfirmasi dari Pemerintah atas draft yang telah dikirim tersebut, mengingat draft RUU dibuat sebelum terjadinya wabah dan mungkin Pemerintah ingin mengganti/merubahnya.

III. KESIMPULAN

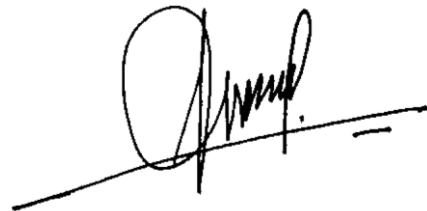
Rapat Badan Legislasi dalam rangka penetapan rancangan Jadwal Rapat pembahasan RUU tentang Cipta Kerja pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020, menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyetujui rancangan jadwal rapat pembahasan RUU tentang Cipta Kerja sebagaimana terlampir
2. Menyetujui pelaksanaan rapat kerja dengan Pemerintah dalam rangka mendengarkan penjelasan atas RUU tentang Cipta Kerja.
3. Menyetujui pembentukan panitia kerja sebelum dilakukan penyerapan aspirasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan para narasumber yang ada.
4. Menyetujui untuk membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai *stakeholder* dan para narasumber yang ada agar dapat memberikan saran dan masukan terhadap RUU tentang Cipta Kerja. Berbagai saran dan masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi fraksi-fraksi di DPR dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
5. Menyetujui pengumpulan DIM oleh fraksi-fraksi di DPR setelah kegiatan penyerapan aspirasi selesai dilakukan. Bagi fraksi-fraksi yang sudah siap untuk mengumpulkan DIM-nya pada saat ini, tetap diperbolehkan dan dapat disempurnakan kembali setelah kegiatan penyerapan aspirasi selesai dilakukan.
6. Menyetujui pembahasan DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (*cluster*) bidang materi muatan yang ada di dalam RUU serta mengutamakan materi muatan yang tidak berdampak sistemik dan/atau mendapatkan pertentangan dari masyarakat (*public*). Dengan demikian, pembahasan DIM dimulai dari materi muatan yang “mudah” dan dilanjutkan ke materi muatan yang “sulit.” Khusus materi muatan di bidang ketenagakerjaan, dilakukan pada akhir pembahasan DIM. Hal ini dimaksudkan agar Badan Legislasi dapat secara optimal menerima berbagai saran dan masukan dari *stakeholders* dan para narasumber yang ada.
7. Menyetujui untuk menugaskan kepada tim ahli Badan Legislasi (Tenaga Ahli dan Badan Keahlian DPR) agar membuat matriks persandingan dari materi

muatan RUU tentang Cipta Kerja dengan materi muatan Undang-Undang terkait (ada +/- 79 UU) berdasarkan pengelompokan (*cluster*) bidangnya.

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB

Jakarta, 7 April 2020
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Widiharto', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001